

Judul : Pembahasan RUU Ekonomi Syariah Perlu Sinergisitas
Tanggal : Sabtu, 25 September 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 12

Pembahasan RUU Ekonomi Syariah Perlu Sinergisitas

■ LIDA PUSPANINGTYAS

JAKARTA — Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam merancang Undang-Undang Ekonomi Syariah yang sudah masuk Program Legislasi Nasional prioritas (Prolegnas) 2022. Pengamat ekonomi syariah IPB University Irfan Syauqi Beik mengatakan, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) ini diharapkan dapat dilakukan secara terbuka.

"Saya berharap DPR RI juga membahas secara terbuka, sehingga kita semua bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif," kata Irfan kepada *Republika* di Jakarta, Jumat (24/9).

Irfan mencontohkan, pembahasan terkait bagaimana UU bisa memayungi pengembangan industri halal atau sektor riil syariah. Selama ini, yang diatur baru terkait sertifikasi dan jaminan produk halal.

Masih ada aspek lain seperti desain pengembangan produk halal, upaya penguatan ekspor halal, penguatan produksi dalam

negeri, dan lain-lainnya yang bisa terakomodasi di RUU ini. UU diharapkan menjadi pelengkap yang menjadi kekurangan di UU lainnya.

"Misalnya kalau di wakaf, saya usul agar ada akomodasi terhadap aspirasi bank syariah menjadi nazir wakaf uang," kata anggota Dewan Komisiner Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut.

Selain itu, terkait pengembangan lembaga penjaminan dan pengembangan aset wakaf yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi wakaf yang ada. UU juga dinilai perlu memperjelas sejumlah insentif konkret untuk pengembangan ekonomi halal.

Irfan menyambut baik masuknya RUU Ekonomi Syariah ke dalam prolegnas tahun depan. Irfan berharap RUU ini bisa memberikan payung hukum yang kokoh bagi upaya memperkuat praktik ekonomi syariah.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menyampaikan, pembahasan RUU akan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah sebagai yang paling berkepentingan. Pembangunan ekosistem ekonomi syariah akan sangat mengandalkan kebersamaan dan kola-

borasi para *stakeholder*-nya.

Pembahasan juga memungkinkan kemunculan berbagai tantangan karena banyak pihak berkepentingan. Namun, Misbakhun mengatakan, DPR RI akan fokus memperkuat landasan dan fondasi ekonomi syariah.

"Bagi kami di DPR RI, berbagai tantangan itu tidak hanya diselesaikan dan dicarikan solusinya oleh DPR RI semata, tapi harus bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* bangsa termasuk di dalamnya yang paling berkepentingan mengembangkan ekonomi syariah ini sebenarnya adalah pemerintah," katanya.

Hal ini mengingat ekonomi syariah adalah sistem alternatif yang sangat potensial membantu pemerintah menumbuhkan perekonomian nasional. Tentunya, Misbakhun mengatakan, dorongan afirmasi dan keberpihakan itu menjadi sangat penting dari pemerintah.

Misbakhun yakin dengan adanya sinergisitas, semua tantangan itu akan lebih bisa diatasi. Berbagai kendala yang selama ini menjadi simpul dapat diurai dan melahirkan kebijakan yang bisa dilaksanakan bersama-sama. ■ **ed:** citra listya rini